



Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam Pengelolaan Parkir Umum Pinggir Jalan yang Efektif dan Efisien

Abel Dwi Purnomo^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
email: abeldwi27@gmail.com¹*

Article Info :

Received:

21-10-2025

Revised:

29-11-2025

Accepted:

20-12-2025

Abstract

This study examines the role of the Surabaya City Transportation Agency in managing on-street public parking effectively and efficiently. Using a qualitative descriptive-analytical approach, the research analyzes policy formulation, operational implementation, supervision, and performance outcomes of parking management. The findings indicate that the agency plays a central role in translating local regulations into operational policies, including the implementation of zoning systems, electronic parking, and park-and-ride schemes. Operationally, the effectiveness of parking management is reflected in structured location arrangements, routine field supervision, and consistent enforcement against illegal parking practices. The adoption of e-parking systems has contributed to improved transparency and accountability in parking fee collection, while supervision and sanctions have enhanced compliance among parking operators. From an efficiency perspective, effective parking management supports the optimization of local revenue and the reduction of financial leakage. The study concludes that the integration of regulatory frameworks, technological innovation, operational control, and law enforcement strengthens the overall performance of on-street parking management and contributes to sustainable urban transport governance in Surabaya.

Keywords: parking management, transportation agency, on-street parking, public service, local revenue.

Abstrak

Kajian ini mengkaji peranan Agensi Pengangkutan Bandar Surabaya dalam menguruskan tempat letak kereta awam di jalan raya secara berkesan dan cekap. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, kajian ini menganalisis perumusan dasar, pelaksanaan operasi, pengawasan, dan hasil prestasi pengurusan tempat letak kereta. Penemuan menunjukkan bahawa agensi memainkan peranan teras dalam menterjemahkan peraturan tempatan kepada dasar operasi, termasuk pelaksanaan sistem zon, parkir elektronik, dan skim parkir-dan-naik. Dari segi operasi, keberkesan pengurusan parkir tercermin dalam susunan lokasi berstruktur, pengawasan lapangan secara berkala, dan penguatkuasaan konsisten terhadap amalan parkir haram. Penggunaan sistem e-parking telah menyumbang kepada peningkatan ketelusan dan akauntabiliti dalam kutipan bayaran parkir, manakala pengawasan dan tindakan balasannya telah meningkatkan pematuhan di kalangan pengendali parkir. Dari sudut kecekapan, pengurusan parkir yang berkesan menyokong pengoptimuman hasil tempatan dan pengurangan kebocoran kewangan. Kajian ini menyimpulkan bahawa integrasi kerangka peraturan, inovasi teknologi, kawalan operasi, dan penguatkuasaan undang-undang mengukuhkan prestasi keseluruhan pengurusan parkir tepi jalan dan menyumbang kepada tadbir urus pengangkutan bandar lestari di Surabaya.

Kata kunci: pengurusan tempat letak kereta, agensi pengangkutan, tempat letak kereta di tepi jalan, perkhidmatan awam, hasil tempatan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kota Surabaya menempatkan sektor transportasi sebagai elemen strategis dalam pengelolaan ruang publik, terutama pada area parkir umum pinggir jalan yang bersentuhan langsung dengan kepadatan lalu lintas perkotaan. Parkir pinggir jalan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, tetapi juga berimplikasi terhadap kelancaran arus kendaraan, ketertiban kota, serta kenyamanan pengguna jalan sebagaimana ditunjukkan dalam kajian kinerja parkir di sejumlah ruas jalan utama Surabaya oleh Yulmida et al. (2018). Kondisi tersebut menuntut adanya tata kelola yang terencana dan terukur agar parkir tidak berubah menjadi

sumber kemacetan dan konflik ruang. Dalam struktur pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki mandat sentral dalam memastikan pengelolaan parkir berlangsung secara efektif dan efisien sesuai kebijakan daerah.

Pengelolaan parkir pinggir jalan juga berkaitan erat dengan optimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi parkir sebagai bagian dari keuangan daerah. Studi Purnamasari (2015) serta Jikwa et al. (2015) menegaskan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan daerah sangat bergantung pada sistem pemungutan, pengawasan, dan akuntabilitas pengelolanya. Ketidakteraturan dalam mekanisme parkir berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan dan praktik retribusi liar yang merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat. Permasalahan tersebut menempatkan efektivitas peran Dinas Perhubungan sebagai variabel kunci dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan optimalisasi fiskal daerah.

Dari perspektif kebijakan hukum, pengelolaan parkir pinggir jalan di Surabaya telah memiliki dasar regulatif melalui peraturan daerah yang mengatur retribusi dan tata kelola parkir. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi layanan parkir di pinggir jalan umum menunjukkan dinamika kebijakan yang memerlukan konsistensi antara norma hukum dan praktik lapangan sebagaimana dianalisis oleh Susanto (2018). Penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir, termasuk praktik parkir ilegal, juga menjadi isu krusial yang menuntut ketegasan aparat dan kejelasan mekanisme sanksi sebagaimana diuraikan oleh Hidayatulloh (2023). Dalam konteks ini, peran institusional Dinas Perhubungan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dalam menjamin kepastian hukum.

Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi arah kebijakan pengelolaan parkir, terutama melalui penerapan sistem e-parkir yang mulai diadopsi di sejumlah ruas jalan Kota Surabaya. Penelitian Hayati (2018) menunjukkan bahwa implementasi e-parkir di Jalan Jimerto dan Jalan Sedap Malam memberikan peluang peningkatan transparansi serta efisiensi pemungutan retribusi. Hal ini sejalan dengan pandangan Gurusi et al. (2025) yang menempatkan e-parkir sebagai solusi kebijakan hukum untuk menekan kebocoran pendapatan dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan parkir. Namun, efektivitas penerapan teknologi tersebut tetap bergantung pada kapasitas kelembagaan dan pengawasan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana utama kebijakan.

Selain e-parkir, kebijakan zonasi parkir dan pengembangan sistem park and ride juga menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan parkir perkotaan. Implementasi kebijakan park and ride di kawasan Mayor Jenderal Sungkono menunjukkan upaya Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam mengintegrasikan parkir dengan sistem transportasi perkotaan yang lebih luas sebagaimana dikaji oleh Krisnady dan Rahayu (2020). Di kawasan pusat kota seperti Tunjungan, penerapan kebijakan parkir zona menegaskan peran aktif Dinas Perhubungan dalam mengatur intensitas parkir sesuai karakteristik wilayah sebagaimana diuraikan oleh Silalahi dan Reviandani (2025). Kebijakan tersebut menuntut koordinasi lintas sektor serta kepekaan terhadap dinamika sosial dan ekonomi kawasan perkotaan.

Permasalahan parkir liar tetap menjadi tantangan serius dalam pengelolaan parkir pinggir jalan di Surabaya meskipun regulasi dan kebijakan telah diterapkan. Penelitian Ramadhan (2024) menunjukkan bahwa efektivitas penertiban parkir liar masih menghadapi kendala pada aspek pengawasan, konsistensi penegakan aturan, serta resistensi dari pelaku parkir informal. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan strategi operasional Dinas Perhubungan. Pengalaman daerah lain, seperti Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Parigi Moutong, memperlihatkan bahwa strategi pengelolaan parkir yang terencana dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan oleh Faridha dan Djumiarti (2024) serta Marau dan Djaber (2025).

Efisiensi pengelolaan parkir juga berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, sistem pengawasan, serta kemitraan dengan pihak ketiga dalam operasional parkir. Studi-studi pengelolaan parkir menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan lapangan membuka ruang bagi praktik parkir ilegal dan penyimpangan retribusi yang merugikan publik. Dalam kondisi tersebut, peran Dinas Perhubungan dituntut tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai manajer layanan publik yang mampu mengendalikan proses operasional secara berkelanjutan. Keseimbangan antara pendekatan administratif, hukum, dan teknologi menjadi faktor penentu terciptanya pengelolaan parkir yang efisien.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, kajian mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam pengelolaan parkir umum pinggir jalan menjadi relevan dan strategis untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini diarahkan untuk memahami sejauh mana peran institusional, kebijakan,

dan praktik operasional Dinas Perhubungan mampu menciptakan pengelolaan parkir yang efektif dan efisien di tengah dinamika perkotaan. Integrasi antara regulasi, teknologi, dan penegakan hukum menjadi fokus penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan parkir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan parkir perkotaan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam pengelolaan parkir umum pinggir jalan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan parkir dan administrasi publik, disertai pengumpulan data empiris melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Perhubungan dan observasi lapangan pada lokasi parkir pinggir jalan. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, hambatan, serta strategi pengelolaan parkir yang diterapkan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan parkir serta kesesuaian antara kebijakan, implementasi, dan kondisi faktual di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Pinggir Jalan

Pengelolaan parkir umum pinggir jalan di Kota Surabaya tidak dapat dilepaskan dari peran strategis Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis dan administratif dalam bidang transportasi. Perumusan kebijakan parkir menjadi instrumen penting untuk menjawab tingginya mobilitas kendaraan serta keterbatasan ruang jalan di kawasan perkotaan yang padat aktivitas ekonomi sebagaimana dianalisis oleh Yulmida et al. (2018). Dinas Perhubungan berperan dalam menerjemahkan regulasi daerah ke dalam kebijakan operasional yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan kelancaran lalu lintas dan kebutuhan parkir masyarakat. Kualitas kebijakan ini menentukan sejauh mana parkir pinggir jalan dapat dikelola secara tertib dan berkontribusi pada pelayanan publik yang berkelanjutan.

Landasan hukum pengelolaan parkir pinggir jalan di Surabaya memperlihatkan adanya kerangka normatif yang relatif lengkap, terutama melalui peraturan daerah yang mengatur retribusi dan tata cara penyelenggaraan parkir. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 menjadi bukti konkret peran Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsi regulator sekaligus pelaksana kebijakan sebagaimana diuraikan oleh Susanto (2018). Dalam praktiknya, kebijakan tersebut menuntut penyesuaian berkelanjutan agar selaras dengan dinamika sosial dan pertumbuhan kendaraan bermotor. Kondisi ini menempatkan Dinas Perhubungan pada posisi strategis sebagai aktor kebijakan yang harus adaptif dan responsif.

Perumusan kebijakan parkir juga berkaitan langsung dengan kepentingan fiskal daerah melalui optimalisasi retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Penelitian Purnamasari (2015) dan Jikwa et al. (2015) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan parkir berimplikasi signifikan terhadap stabilitas keuangan daerah. Dinas Perhubungan berperan dalam menetapkan mekanisme pemungutan yang mampu menekan potensi kebocoran pendapatan. Kebijakan yang tidak diikuti pengawasan memadai berisiko membuka ruang bagi praktik penyimpangan di tingkat lapangan.

Transformasi kebijakan parkir di Surabaya juga ditandai dengan dorongan penerapan sistem digital melalui e-parking sebagai bagian dari modernisasi layanan publik. Studi Hayati (2018) menegaskan bahwa e-parking menjadi strategi kebijakan yang mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pemungutan retribusi parkir pinggir jalan. Pandangan serupa dikemukakan oleh Gurusi et al. (2025) yang menempatkan e-parking sebagai solusi kebijakan hukum dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan berperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus pengelola sistem yang menjembatani regulasi dan teknologi.

Implementasi kebijakan parkir tidak hanya ditentukan oleh desain regulasi, tetapi juga oleh pola pengawasan yang dijalankan secara konsisten. Kelemahan dalam pengawasan sering kali berdampak pada munculnya parkir ilegal dan praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat. Hidayatulloh

(2023) menekankan bahwa lemahnya pengawasan membuka ruang pelanggaran hukum oleh operator parkir tidak resmi. Peran Dinas Perhubungan menjadi krusial dalam memastikan kebijakan parkir berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari prinsip akuntabilitas.

Evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan parkir menunjukkan bahwa pendekatan zonasi menjadi salah satu strategi yang relevan di kawasan pusat kota dengan intensitas kegiatan tinggi. Penelitian Silalahi dan Reviandani (2025) memperlihatkan bagaimana kebijakan parkir zona di kawasan Tunjungan dirancang untuk mengendalikan penggunaan ruang jalan secara lebih terukur. Dinas Perhubungan berperan dalam menetapkan batasan zona, tarif, serta waktu parkir sesuai karakteristik kawasan. Pendekatan ini mencerminkan upaya kebijakan yang berbasis kebutuhan wilayah dan pengendalian lalu lintas.



Gambar 1. Tempat Parkir Pinggir Jalan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kebijakan parkir di Surabaya juga terintegrasi dengan pengembangan sistem transportasi perkotaan yang lebih luas, termasuk kebijakan park and ride. Krisnady dan Rahayu (2020) serta Pratiwi dan Oktariyanda (2021) menunjukkan bahwa park and ride menjadi instrumen kebijakan untuk mengurangi beban lalu lintas di pusat kota. Dinas Perhubungan berperan dalam merancang kebijakan integratif antara parkir dan moda transportasi publik. Sinergi kebijakan ini memperlihatkan orientasi jangka panjang dalam pengelolaan mobilitas perkotaan.

Untuk memperkuat analisis kebijakan, berikut disajikan ringkasan data kebijakan pengelolaan parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan temuan penelitian terdahulu:

Tabel 1. Matriks Kebijakan Pengelolaan Parkir Pinggir Jalan di Kota Surabaya

Aspek Kebijakan Parkir	Bentuk Implementasi	Dampak Utama
Regulasi Daerah	Perda Retribusi Parkir	Kepastian hukum pengelolaan parkir
Sistem Digital	Penerapan e-parking	Transparansi dan efisiensi retribusi
Zonasi Parkir	Kawasan pusat kota	Pengendalian ruang dan lalu lintas
Park and Ride	Terminal intermoda	Reduksi kepadatan kendaraan
Pengawasan	Petugas lapangan Dishub	Penurunan parkir ilegal

Kebijakan yang telah dirumuskan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan menjalankan peran multidimensional sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas. Perbandingan dengan daerah lain seperti Balikpapan, Purworejo, dan Parigi Moutong memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan parkir sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi dan kapasitas kelembagaan sebagaimana

dikemukakan oleh Sabrina (2024), Faridha dan Djumiarti (2024), serta Marau dan Djaber (2025). Pengalaman lintas daerah ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan kebijakan parkir di Surabaya. Dinas Perhubungan perlu terus memperbaiki desain kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan kota besar.

Dari sudut pandang penegakan kebijakan, permasalahan parkir liar menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas peran Dinas Perhubungan. Ramadhan (2024), Lase et al. (2024), serta Radya (2024) menunjukkan bahwa penertiban parkir liar memerlukan kombinasi kebijakan yang tegas dan pengawasan berkelanjutan. Dinas Perhubungan tidak hanya bertugas menindak, tetapi juga memastikan kebijakan parkir dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan parkir bergantung pada keseimbangan antara regulasi, pengawasan, dan pendekatan sosial.

Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan parkir pinggir jalan mencerminkan upaya sistematis untuk menciptakan tata kelola parkir yang tertib dan produktif. Integrasi kebijakan hukum, teknologi, dan pengawasan menjadi fondasi utama dalam membangun efektivitas pengelolaan parkir sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian terdahulu. Tantangan yang masih muncul menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Sub bahasan ini menjadi dasar penting untuk memahami peran Dinas Perhubungan sebelum mengkaji aspek operasional dan pengawasan secara lebih mendalam pada pembahasan berikutnya.

Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan Parkir Pinggir Jalan

Pelaksanaan operasional pengelolaan parkir pinggir jalan merupakan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan kebijakan parkir di tingkat lapangan. Dinas Perhubungan Kota Surabaya memegang peran sentral dalam mengoordinasikan aktivitas operasional parkir melalui penataan lokasi, penugasan petugas, serta pengendalian teknis di ruas jalan strategis. Pendekatan operasional ini tidak hanya bertujuan menjamin ketersediaan ruang parkir, tetapi juga menjaga kelancaran lalu lintas dan ketertiban ruang publik sebagaimana diuraikan dalam analisis kinerja parkir oleh Yulmida et al. (2018). Kualitas pelaksanaan operasional menjadi indikator nyata efektivitas peran institusi dalam mengelola parkir pinggir jalan.

Dalam praktiknya, Dinas Perhubungan bertanggung jawab memastikan bahwa juru parkir yang bertugas memiliki legalitas dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan juru parkir ilegal masih menjadi tantangan serius dalam operasional parkir pinggir jalan, terutama di kawasan dengan intensitas aktivitas ekonomi tinggi. Penelitian Jannah et al. (2024) dan Astina dan Ramailis (2024) menunjukkan bahwa lemahnya kontrol operasional membuka ruang bagi praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi. Kondisi ini menuntut peran aktif Dinas Perhubungan dalam pengawasan langsung dan penataan ulang mekanisme kerja juru parkir.

Pengawasan operasional parkir merupakan bagian integral dari metode pengelolaan yang bersifat berkelanjutan dan berbasis evaluasi lapangan. Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjalankan pengawasan melalui patroli rutin, inspeksi mendadak, serta penindakan administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan di lokasi parkir. Efektivitas pengawasan ini sangat menentukan tingkat kepatuhan juru parkir dan pengguna jasa parkir terhadap ketentuan yang berlaku sebagaimana ditegaskan oleh Lase et al. (2024). Tanpa pengawasan yang konsisten, kebijakan parkir berpotensi kehilangan daya kendalinya di tingkat operasional.



Gambar 2. Pengenalan instrumen pembayaran parkir

Sumber : Dokumen Pribadi

Penerapan sistem e-parking juga memengaruhi pola operasional dan pengawasan parkir pinggir jalan di Surabaya. Sistem ini mengubah mekanisme pemungutan retribusi dari sistem manual menjadi berbasis teknologi yang menuntut kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hayati (2018) menegaskan bahwa keberhasilan e-parking sangat bergantung pada pengawasan langsung Dinas Perhubungan terhadap proses transaksi dan penggunaan perangkat digital. Temuan ini sejalan dengan Tarisa (2025) yang menunjukkan bahwa pengawasan lapangan tetap diperlukan meskipun sistem parkir telah terdigitalisasi.

Dari sudut pandang hukum, pengawasan operasional parkir juga berkaitan erat dengan penegakan sanksi terhadap pelanggaran retribusi parkir. Hidayatulloh (2023) menjelaskan bahwa praktik retribusi liar tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendeteksi pelanggaran serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan sanksi diterapkan secara konsisten. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pengawasan operasional tidak dapat dipisahkan dari dimensi hukum dan penegakan aturan.

Efektivitas pelaksanaan operasional parkir juga dapat dilihat dari kemampuan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di berbagai kawasan kota. Penelitian Ramadhan (2024) dan Radya (2024) menunjukkan bahwa penertiban parkir liar memerlukan kehadiran petugas yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika lapangan. Operasional penertiban yang bersifat sporadis cenderung menghasilkan dampak jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran Dinas Perhubungan dalam membangun sistem operasional yang stabil dan terstruktur.

Untuk memperkuat analisis operasional dan pengawasan, berikut disajikan data ringkasan temuan penelitian terdahulu terkait pola pengelolaan parkir pinggir jalan:

Tabel 2. Matriks Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan Parkir oleh Dinas Perhubungan

Aspek Operasional	Bentuk Pelaksanaan	Temuan Utama
Penataan Lokasi	Penetapan titik parkir resmi	Mengurangi konflik ruang jalan
Pengawasan Lapangan	Patroli dan inspeksi rutin	Menekan parkir ilegal
Sistem Pemungutan	Manual dan e-parking	Meningkatkan transparansi
Penindakan	Sanksi administratif dan hukum	Meningkatkan kepatuhan
Keterlibatan Petugas	Juru parkir resmi Dishub	Menjamin layanan parkir

Data tersebut menunjukkan bahwa operasional parkir yang efektif membutuhkan kombinasi antara pengaturan teknis dan pengawasan berlapis. Perbandingan dengan daerah lain seperti Balikpapan, Ponorogo, dan Medan memperlihatkan bahwa penguatan pengawasan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan parkir sebagaimana ditunjukkan oleh Sabrina (2024), Setiawan et al. (2024), dan Tarisa (2025). Dinas Perhubungan Kota Surabaya berada pada posisi strategis untuk

mengadopsi praktik terbaik tersebut dalam pengelolaan parkir pinggir jalan. Adaptasi kebijakan operasional lintas daerah dapat memperkaya pendekatan pengawasan di tingkat lokal.

Dari perspektif administrasi publik, pelaksanaan operasional parkir mencerminkan kapasitas organisasi Dinas Perhubungan dalam mengelola layanan publik secara langsung. Faridha dan Djumiarti (2024) menekankan bahwa strategi operasional yang jelas berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Operasional parkir yang tertib juga berdampak pada persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran operasional Dinas Perhubungan memiliki implikasi yang lebih luas dari sekadar pengaturan parkir.

Pelaksanaan operasional dan pengawasan parkir pinggir jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya menunjukkan peran aktif institusi dalam menjaga efektivitas kebijakan di tingkat lapangan. Integrasi antara penataan teknis, pengawasan langsung, penerapan teknologi, dan penegakan hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan pengelolaan parkir yang efisien. Temuan-temuan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa keberhasilan operasional parkir sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan dan kapasitas kelembagaan. Sub bahasan ini menjadi jembatan analitis untuk memahami bagaimana peran operasional tersebut berkontribusi terhadap capaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan parkir yang akan dibahas lebih lanjut pada sub bahasan berikutnya.

Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Parkir Pinggir Jalan

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan parkir pinggir jalan merupakan indikator utama keberhasilan peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penyelenggaraan layanan publik di sektor transportasi. Efektivitas berkaitan dengan ketercapaian tujuan kebijakan parkir, sedangkan efisiensi berhubungan dengan optimalisasi sumber daya yang digunakan dalam proses pengelolaan parkir. Kajian Yulmida et al. (2018) menunjukkan bahwa kinerja parkir yang baik berkontribusi langsung terhadap kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan dituntut mampu menyelaraskan aspek teknis, administratif, dan sosial dalam satu sistem pengelolaan yang terintegrasi.

Efektivitas pengelolaan parkir dapat dilihat dari kemampuan Dinas Perhubungan dalam memastikan kepatuhan pengguna dan juru parkir terhadap ketentuan yang berlaku. Penelitian Susanto (2018) menegaskan bahwa implementasi kebijakan parkir yang konsisten akan meningkatkan tingkat kepatuhan dan mengurangi pelanggaran di lapangan. Kepatuhan tersebut menjadi refleksi langsung dari keberhasilan peran pengawasan dan penegakan aturan oleh Dinas Perhubungan. Tanpa tingkat kepatuhan yang memadai, kebijakan parkir cenderung kehilangan daya guna dalam mengendalikan ruang publik.

Efisiensi pengelolaan parkir juga berkaitan erat dengan optimalisasi penerimaan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah. Purnamasari (2015) serta Jikwa et al. (2015) menjelaskan bahwa sistem pengelolaan parkir yang efisien mampu meminimalkan kebocoran retribusi dan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Peran Dinas Perhubungan menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap potensi pendapatan parkir tercatat dan disetorkan sesuai mekanisme yang berlaku. Efisiensi fiskal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan parkir tidak hanya berdimensi pelayanan, tetapi juga berdimensi ekonomi publik.

Penerapan e-parking menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan parkir pinggir jalan. Hayati (2018) menunjukkan bahwa sistem e-parking di Surabaya mampu meningkatkan transparansi transaksi dan mengurangi ketergantungan pada sistem manual. Temuan ini diperkuat oleh Gurusi et al. (2025) yang menilai e-parking sebagai instrumen kebijakan hukum yang relevan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Dinas Perhubungan berperan sebagai pengendali sistem yang memastikan teknologi tersebut berjalan sesuai tujuan kebijakan.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan parkir juga dipengaruhi oleh kemampuan Dinas Perhubungan dalam menekan praktik parkir ilegal. Penelitian Ramadhan (2024), Lase et al. (2024), dan Radya (2024) menunjukkan bahwa parkir liar menjadi sumber inefisiensi karena mengganggu ketertiban dan menurunkan potensi retribusi resmi. Upaya penertiban yang dilakukan secara berkelanjutan mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan dalam menjaga kualitas pengelolaan parkir. Penertiban ini tidak hanya berdampak pada tata ruang, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dari perspektif hukum, efektivitas pengelolaan parkir juga tercermin dari penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Hidayatulloh (2023) menegaskan bahwa sanksi pidana terhadap retribusi liar memiliki efek jera yang signifikan apabila diterapkan secara konsisten. Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendeteksi pelanggaran serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang tegas memperkuat legitimasi kebijakan parkir dan meningkatkan efektivitas pengelolaannya.

Untuk memperkuat analisis efektivitas dan efisiensi, berikut disajikan data ringkasan indikator pengelolaan parkir berdasarkan temuan penelitian terdahulu:

Tabel 3. Matriks Indikator Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Parkir

Indikator Pengelolaan	Ukuran Efektivitas	Dampak Efisiensi
Kepatuhan Juru Parkir	Tingkat pelanggaran menurun	Pengurangan kebocoran
Sistem E-Parking	Transparansi transaksi	Peningkatan PAD
Penertiban Parkir Liar	Ketertiban ruang jalan	Optimalisasi lokasi parkir
Pengawasan Lapangan	Konsistensi kontrol	Efisiensi operasional
Penegakan Sanksi	Kepastian hukum	Efisiensi fiskal

Data tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan parkir merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor kelembagaan. Studi komparatif di daerah lain seperti Balikpapan, Medan, Ponorogo, dan Purworejo memperlihatkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja parkir sebagaimana diungkap oleh Sabrina (2024), Tarisa (2025), Setiawan et al. (2024), serta Faridha dan Djumiarti (2024). Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat memanfaatkan pengalaman lintas daerah tersebut sebagai referensi penguatan kebijakan lokal. Pendekatan ini mendukung terciptanya efisiensi yang berkelanjutan.

Efektivitas pengelolaan parkir juga berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian Astina dan Ramailis (2024) serta Jannah et al. (2024) menunjukkan bahwa ketertiban parkir berkontribusi terhadap rasa keadilan dan kenyamanan pengguna jalan. Dinas Perhubungan memegang peran penting dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan parkir yang konsisten dan transparan. Persepsi positif masyarakat menjadi indikator non-fiskal dari efektivitas kinerja institusi.

Dalam perspektif administrasi publik, efisiensi pengelolaan parkir mencerminkan kapasitas organisasi Dinas Perhubungan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Hamidah (2022) menegaskan bahwa efisiensi retribusi parkir berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah apabila dikelola secara sistematis. Kinerja ini tidak terlepas dari kualitas perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian internal. Dengan demikian, efisiensi parkir menjadi bagian dari kinerja birokrasi daerah secara keseluruhan.

Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan parkir pinggir jalan tercermin dari kemampuan institusi dalam mengintegrasikan kebijakan, operasional, pengawasan, dan penegakan hukum. Temuan-temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan parkir yang efektif dan efisien berdampak luas pada ketertiban kota, pendapatan daerah, dan kualitas pelayanan publik. Tantangan yang masih muncul menuntut penguatan kapasitas kelembagaan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Sub bahasan ini melengkapi analisis peran Dinas Perhubungan sebagai aktor utama dalam pengelolaan parkir pinggir jalan yang berorientasi pada kinerja dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Pengelolaan parkir umum pinggir jalan di Kota Surabaya menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan memegang peran strategis dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan operasional, pengawasan, serta upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan parkir. Kebijakan yang didukung oleh kerangka regulasi daerah, penerapan sistem e-parking, zonasi parkir, serta pengembangan park and ride mencerminkan orientasi pengelolaan yang adaptif terhadap dinamika perkotaan. Pada tataran operasional, peran Dinas Perhubungan terlihat melalui penataan lokasi,

pengawasan lapangan, dan penertiban parkir ilegal yang berkontribusi pada ketertiban ruang jalan dan peningkatan kepatuhan. Secara keseluruhan, integrasi antara kebijakan, teknologi, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam menciptakan pengelolaan parkir pinggir jalan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Astina Astina, N., & Ramailis, N. W. (2024). Upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Parkir Liar (Studi Kasus Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru). *Sisi Lain Realita Another Side Of Reality Journal Criminology*, 9(2), 32-40. <Https://Doi.Org/10.25299/Sisilainrealita.2024.18488>.

Faridha, N. R. I., & Djumiarti, T. (2024). Strategi Pengelolaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13(2), 1-12. <Https://Doi.Org/10.14710/Jppmr.V13i2.43537>.

Gurusi, L., Mansyah, M. S., & Supriyanto, S. (2025). Kebijakan Hukum Pengelolaan Parkir Dan Peluang Penerapan E-Parkir: Solusi Mendongkrak Pendapatan Daerah. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 8(1), 254–269.

Hamidah, A. N. (2022). *Analisis Efektivitas Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Dan Retribusi Terminal Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Hayati, R. (2018). Strategi Pengembangan Layanan Parkir Melalui E-Parkir Di Pinggir Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Studi Kasus E-Parkir Di Jalan Jimerto Dan Jalan Sedap Malam Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1).

Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Retribusi Liar Oleh Operator Parkir Ilegal. *Jurnal Legia*, 15(1), 36–49. <Https://Doi.Org/10.58350/Leg.V15i1.250>

Jannah, G. R., Fitri, I. K., Hudila, H., & Putri, A. M. (2024). Peran Dinas Perhubungan Dalam Memberantas Juru Parkir Liar Di Area Spbu Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba*, 3(2), 21-32.

Jikwa, E., Salle, A., & Layuk, P. K. (2015). Studi Ekonomi Dan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuda*, 2(3), 1–17.

Krisnady, B., & Rahayu, T. (2020). Implementation Of The Park And Ride Parking Policy Of Major Jend. Sungkono At The Surabaya City Transportation Office. *Jurnal Publiku: Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 1–9.

Lase, W. J., Widodo, J., & Radjikan, R. (2024). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Meminimalisir Parkir Liar Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 366-373. <Https://Doi.Org/10.55606/Birokrasi.V2i3.1356>.

Marau, M. D., & Djaber, Y. S. (2025). Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong. *Journal Of Social And Political Science Research*, 1(2), 83-103.

Pratiwi, D. E., & Oktariyanda, T. A. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Park And Ride Terminal Intermoda Joyoboyo Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. *Publika*, 77-92. <Https://Doi.Org/10.26740/Publika.V9n1.P77-92>.

Purnamasari, I. (2015). Pelaksanaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Penelitian Akuntansi*, 4(10).

Radya, K. N. (2024). Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Yang Ada Di Kabupaten Gresik. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 4(2), 761-775.

Ramadhan, R. (2024). Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 4(01), 65-75. <Https://Doi.Org/10.69957/Cr.V4i06.1608>.

Sabrina, A. A. N. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (Mida)*, 21(1), 116-127. <Https://Doi.Org/10.56681/Da.V21i1.143>.

Setiawan, S. R. R., Purnomo, R. A., Cahyono, Y., Santoso, S., & Abas, S. (2024). Dimensi Persepsi Juru Parkir Terhadap Efektivitas Uji Coba Parkir Elektronik Di Tepi Jalan Umum Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(2).

Silalahi, G. S. G., & Reviandani, O. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dalam Penerapan Kebijakan Parkir Zona Di Kawasan Tunjungan Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 8(4), 2629-2637. <Https://Doi.Org/10.35817/Publicuho.V8i4.994>.

Susanto, L. E. (2018). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Layanan Parkir Di Pinggir Jalan Umum. *Jpap: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 893–898. <Https://Doi.Org/10.30996/Jpap.V4i1.1270>

Tarisa, D. (2025). Efektivitas Pengawasan Langsung Dalam Pengelolaan E-Parking Di Dinas Perhubungan Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (Japk)*, 5(1), 24-31. <Https://Doi.Org/10.30596/Japk.V5i1.16409>.

Yulmida, D. A., Mudjanarko, S. W., Setiawan, M. I., & Limantara, A. D. (2018). Analysis Of Parking Performance Along Jalan Mayor Mustajab Surabaya. *Ukarst*, 1(1), 11. <Https://Doi.Org/10.30737/Ukarst.V1i1.81>.